

Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Atas

**Ester Tiwery¹, Michael Alan Hirdi Pukada², Ester Uru Hida³, Oriyanto Eks
Enus⁴**

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Indonesia

942024010@student.uksw.edu, 942024008@student.uksw.edu

942024001@student.uksw.edu, 942024013@student.uksw.edu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya. Pengelolaan dana BOS memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional sekolah, terutama untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian mencakup Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Komite Sekolah, dan Guru yang terlibat dalam manajemen BOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang melibatkan semua pihak terkait. Dana BOS disalurkan dalam dua tahap per tahun, yaitu pada bulan Januari dan Juli, dengan rincian penggunaan anggaran yang telah disesuaikan dengan petunjuk teknis. Pembukuan dana BOS dilakukan dengan cermat, meliputi buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh pihak internal dan eksternal sekolah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya berjalan dengan baik, meskipun masih membutuhkan bantuan tambahan dari pemerintah provinsi dan kontribusi orang tua siswa untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah.

Kata kunci: **Dana BOS, Perencanaan, Penerapan, Pengawasan, Penilaian, Pelaporan**

ABSTRACT

This study aims to describe the management of the School Operational Assistance Fund (BOS) at SMA Negeri 13 Southwest Maluku. The management of BOS funds has an important role in supporting the smooth running of school operations, especially to help students from underprivileged families. The research method used was descriptive qualitative with interview, observation, and documentation approaches. The research subjects included the school principal, BOS treasurer, school committee, and teachers involved in BOS management. The results showed that budget planning was conducted through the preparation of the School Work and Budget Plan (RKAS) that involved all related parties. BOS funds were disbursed in two stages per year, namely in January and July, with details of the use of the budget that had been adjusted to the technical guidelines. The bookkeeping of BOS funds was done carefully, including the general cash book, bank assistant book, and tax assistant book. Supervision and evaluation were conducted by internal and external school parties to ensure transparency and accountability. Overall, the management of BOS funds at SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya is running well,

although it still requires additional assistance from the provincial government and contributions from parents to fulfill the school's operational needs.

Keyword: BOS Funds, Planning, Implementation, Monitoring, Assessment, Reporting

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pembelajaran Nasional menjamin bahwa setiap masyarakat yang berumur 7 – 15 tahun harus menjangkai pendidikan dasar sampai menengah atas. Hal ini merupakan mandat pemerintah yang bertanggung jawab membagikan layanan pembelajaran serta mendanai penerapan program pembelajaran, untuk partisipan ajar pada tingkatan Sekolah Dasar (SD) serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan pembelajaran sederajatnya. Dalam melakukan dan mendukung pendapatan program penyelesaian pendidikan dasar 9 tahun (WAJAR 9 tahun), tercantum bahwa anak Indonesia wajib mendapatkan pembelajaran minimum 12 tahun, sehingga pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Namun, program ini sedang dalam proses pengesahan.

Menurut (Widodo, 2015), menyusutnya keahlian warga dalam mengakses pembelajaran merupakan dampak dari eskalasi harga BBM, sebab beberapa besar pengeluaran merupakan keinginan utama. Alibi yang melatarbelakangi anak tidak meneruskan tahapan pembelajaran di tingkat SMP serta SMA ialah permasalahan ekonomi. Tidak hanya itu, banyak aspek yang memengaruhi seperti salah satunya akses warga yang minim kepada pembelajaran baik. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam meluncurkan Bantuan Operasional Sekolah. Kementrian pendidikan dan kebudayaan sudah meluncurkan kebijaksanaan Pembelajaran Menengah Umum (PMU) yang implementasinya difokuskan untuk berbagi peluang kepada semua warga (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2024). Tujuan penting program tersebut membantu masyarakat dengan ekonomi ke bawah yang tidak sanggup membayar operasional sekolah, pula membagikan layanan pembelajaran terjangkau serta baik paling utama untuk anak didik miskin. Konsep Strategi Kemenbud 2010-2014 menjabarkan aplikasi PMU difokuskan pada kenaikan layanan partisipan ajar dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA), tersedianya energi muat pembelajaran menengah lewat pembangunan. Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB) serta rehabilitasi bangunan sekolah, penyediaan serta kenaikan mutu guru lewat kenaikan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) atau pun perguruan tinggi (PT), penyediaan guru produktif dan pengusulan pengangkatan guru sekolah menengah.

Pemerintah secara umum memberikan Dana BOS SMA untuk menciptakan layanan pembelajaran yang terjangkau serta baik untuk seluruh warga (Sari, 2016). Besaran Anggaran yang diperoleh masing-masing sekolah dihitung bersumber pada jumlah peserta didik per sekolah serta satuan dana BOS SMA. Durasi penyaluran anggaran dana BOS SMA ini diserahkan ke sekolah per semester/per tahap. Pengurusan dana BOS SMA harus berdasar pada petunjuk teknis dana BOS SMA yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan SMA, selaku teknis yang bertanggung jawab dalam penerapan serta pengurusan dana BOS SMA. Salah satu aspek yang memengaruhi kesuksesan program dana BOS SMA merupakan Pengurusan Anggaran serta seluruh sumber daya yang terdapat dalam dana BOS SMA. Dalam hal ini, penggunaan dana BOS SMA yang baik dapat mendorong ketercapaian tujuan dari program dana BOS SMA dengan efisien serta berdaya guna.

Konsep Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang telah disusun bendahara BOS untuk dimintai tindak lanjut kepada Pusat, terjadi perubahan aturan mengenai penggunaan Dana BOS SMA (Suharto, 2017). Hal tersebut menjadikan sekolah melakukan penyusunan RAB BOS perubahan dengan disesuaikan pada penggunaan Dana RAB BOS SMA yang baru. Penyusunan perubahan RAB BOS SMA ini, menjadikan penyaluran Dana BOS SMA ke sekolah terlambat. Penyusunan RAB BOS SMA harus sesuai dengan juknis dana BOS SMA. Penyaluran dana BOS SMA dari pusat masuk ke rekening sekolah, pengawasan dilakukan oleh Pengawas Provinsi (Mawardi, 2019). Publikasi yang dilakukan SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya terkait Pengelolaan Dana BOS SMA dapat dikatakan cukup transparan dan akuntabel. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengawasi pengelolaan dana BOS melalui wadah pengaduan masyarakat maupun pemberian kritik dan saran yang disediakan oleh sekolah (Suryani, 2020).

Melihat pentingnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penyelenggaraan pendidikan dan berbagai masalah yang melingkupi, hal tersebut menjadi minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan atau menggambarkan dan mengungkap berbagai situasi-situasi yang sangat kompleks. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2024

sampai dengan awal bulan Desember 2024. Lokasi penelitian bertempat di SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya. Subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Bendahara BOS SMA, Komite Sekolah dan guru yang terkait dalam manajemen program BOS SMA. Objek penelitian ini adalah data yang terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Menengah Atas (BOS SMA).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya. Wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Bendahara BOS SMA, dan Guru. Dokumentasi data meliputi profil SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya dan data pengelolaan Dana BOS SMA.

Menurut (Hidayati, 2019) Teknik analisa data dilakukan dengan langkah pertama reduksi data, yaitu data-data pengelolaan dana BOS yang terkumpul diorganisasi dan dipilih sesuai yang diperlukan. Langkah berikutnya penyajian data, yaitu data pengelolaan dana BOS yang telah direduksi dan disusun, kemudian disajikan dalam bentuk narasi. Langkah terakhir ialah penarikan kesimpulan yang divalidasi dengan verifikasi data-data baru dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya melaksanakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan tahap berikut:

Perencanaan Proses Penyusunan RKAS dan RAB BOS

RKAS SMA di SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya disusun untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun. Kegiatan penyusunan RKAS diawali dengan mengumpulkan semua guru dan karyawan untuk melakukan pendataan kebutuhan atau kegiatan dari masing-masing bidang. Perubahan RKAS juga dilakukan karena terdapat kegiatan awal yang telah direncanakan tetapi tidak dapat terealisasi pada tahun berjalan anggaran tersebut, sehingga sekolah akan menggantikan dengan kegiatan lain dan disusun dalam draft RKAS perubahan. Sumber dana yang digunakan untuk kegiatan di SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya, terdiri dari berbagai macam yaitu dana dari orang tua, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi.

Penggunaan dana untuk masing-masing anggaran disesuaikan dengan peraturan. Analisis hasil terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS SMA dibuat bersama dengan penyusunan RKAS. Menurut (Darmawan, 2020), kegiatan yang dapat didanai dengan menggunakan Dana BOS SMA hanya kegiatan operasional sekolah non-operasional seperti yang telah dijelaskan pada petunjuk

teknis BOS SMA. Perencanaan Dana BOS SMA yang disusun oleh SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya. Penyusunan RAB BOS SMA di SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya, RAB tahun 2024 dengan presentase penggunaan dana yaitu untuk standar isi 0,32 %, standar proses 13,14%, standar pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 7,30%, pengembangan sara dan prasarana sekolah 29,25%, pengembangan standar pengelolaan 18,28 %, standar pembiayaan 21,39% dan standar pengembangan dan implementasi system pendidikan 10,32%, Tersedianya dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) telah membantu sekolah dalam pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sekolah. Sesuai dengan tujuan diselenggarakan program BOS SMA salah satunya adalah mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan dan/atau membantu tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin (Nugroho, 2021).

Proses Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS

Menurut (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2024) analisis hasil penelitian terhadap komponen pelaksanaan, untuk penyaluran Dana BOS SMA dilakukan setiap semester yakni satu tahun dua kali penerimaan. Petunjuk teknis BOS SMA tahun 2024 menjelaskan besaran dana yang diterima adalah tahap pertama Rp2.246.202.68/siswa/tahun anggaran. Anggaran Dana BOS SMA tahun 2024 periode kedua sekolah menerima Dana BOS SMA pada bulan Januari 2024 besarnya dana Rp 760.278.000,00 dengan jumlah siswa 677 siswa. tahap kedua Rp2.246.202,68 per siswa/tahun anggaran Anggaran Dana BOS SMA tahun 2024 periode pertama sekolah menerima Dana BOS SMA pada bulan Juli 2024 besarnya dana Rp760.280.000,00 dengan jumlah siswa 677 siswa.

Pengambilan Dana BOS SMA memiliki prosedur tersendiri (Marzuki, 2020). Sekolah wajib menunjukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada pihak bank penyalur. Pengambilan dana dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah atau Bendahara BOS SMA.

Proses Penggunaan, Pembelanjaan, dan Pembukuan

Rincian penggunaan dana yang dijabarkan pada LPJ BOS SMA di SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya telah sesuai dengan petunjuk teknis BOS SMA tahun 2024 periode pertama bulan Januari sampai Juni dan periode kedua bulan Juli sampai bulan Desember. Penggunaan dana BOS SMA di SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya tahun 2024 digunakan untuk RAB tahun 2024 dengan presentase penggunaan dana yaitu untuk standar isi Rp 4.875.000,00 (0,32%,) standar proses Rp 199.767.500,00 (13,14%), standar pengembangan pendidik dan tenaga

kependidikan Rp 111.025.000 (7,30%) , pengembangan sara dan prasarana sekolah Rp 444.749.000,00(29,25%) ,pengembangan standar pengelolaan Rp 278.003.500,00 (18,28 %), standar pembiayaan Rp 325.180.000,00 (21,39%) dan standar pengembangan dan implementasi system pendidikan Rp 156.960.000,00 (10,32%). Dana yang digunakan untuk kegiatan yang lebih penting, mengingat menggunakan dana BOS SMA harus berdasarkan skala prioritas.

Jumlah dana BOS SMA yang diterima oleh SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya termasuk dana yang cukup besar, namun apabila dibandingkan dengan penggunaan sekolah untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sekolah dana tersebut masih dalam kategori cukup. Sekolah masih membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kualitas. Sekolah membutuhkan dana yang berasal dari wali siswa berupa Sumbangan Komite untuk memnuhi kegiatan operasional sekolah selain yang dapat didanai dengan Dana BOS SMA. Sumbangan Komite dibayarkan oleh wali siswa setiap bulannya, terdapat perbedaan jumlah dana antara siswa yang satu dengan yang lain. Kriteria keringan pembayaran Sumbangan Komite siswa ditentukan berdasarkan tingkat penghasilan orang tua/wali siswa. Siswa yang penghasilan orang tuannya besar maka akan dikenakan pembayaran sumbangan komite sebesar 75%, selain itu juga ada tingkat pembayaran 50% dan 25%.

Analisis hasil terhadap pembukuan yang dibuat oleh sekolah dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS SMA adalah buku kas umum, buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Pelaksanaan pembukuan dibuat oleh Bendahara setiap transaksi, setelah itu pembukuan tersebut akan dilakukan pembaruan olen Bendahara BOS terkait transaksi-transaksi yang dibiayai menggunakan dana BOS SMA. Pelaksanaan rekap data yang dilakukan oleh Bendahara BOS dilakukan setiap bulan, sehingga menyebabkan keterlambatan saat melakukan penyerahan Pelaporan LPJ BOS SMA. Setiap terjadi transaksi tim belanja wajib meminta bukti transaksi kepada pihak penjual untuk diberikan bukti kepada Bendahara BOS yang nama akan dijadikan sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan pembukuan (Suryani, 2019). Pembukuan dan bukti transaksi tersebut, akan dijadikan sebagai lampiran untuk melengkapi LPJ BOS SMA.

Proses Pengembalian Dana dan Perpajakan Terkait Dana BOS

Karena SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya tidak ada kelebihan dana BOS SMA, maka tidak ada dana yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat. Dari aspek perpajakan, sekolah telah melaksanakan ketentuan perpajakan. Pelaksanaan tersebut didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku dan telah

disesuaikan dengan ketentuan perpajakan pada petunjuk teknis BOS SMA. Pajak disetorkan oleh sekolah melalui kantor pos/bank dengan menggunakan blanko Surat Setoran Pajak (SPP). Bukti penyetoran dari bank/kantor pos dan SPP akan dilampirkan pada LPJ BOS SMA. Lampiran buku pembantu pajak dan pembukuan kas umum pada LPJ BOS SMA di SMA Negeri 13 Maluku barat Daya sudah merinci semua pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh sekolah. Sekolah telah melaksanakan ketentuan perpajakan sebagaimana yang telah dijelaskan di petunjuk teknis BOS SMA tahun 2013 dan 2014 untuk pengelolaan dana BOS SMA tahap pertama dan kedua. Pajak yang disetorkan oleh SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya yaitu berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH pasal 21 dan pasal 22).

Pengawasan Dana BOS

Pengawasan dana BOS terhadap SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya dilakukan dari pihak internal sekolah dan pihak eksternal sekolah. Pihak internal sekolah yang melakukan pengawasan adalah Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi melalui Cabang Disana Dikmen Diksus Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Barat Daya. Menurut (Hartanto, 2017) pihak eksternal sekolah yang melakukan pengawasan adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan Pusat (Direktorat Pendidikan Menengah).

Evaluasi Dana BOS

Komponen kegiatan Evaluasi Dana BOS SMA di SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. (Rahman, 2021) Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Provinsi yaitu terkait dengan LPJ Pengelolaan Dana BOS SMA yang dikumpulkan oleh pihak sekolah. Hasil pengecekan dari Dinas Provinsi apabila ada kesalahan sekolah diminta untuk melakukan perubahan. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bendahara BOS diketahui pada Pengelolaan Dana BOS SMA tahun 2024 ada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait pembukuan Pengelolaan Dana BOS SMA yang mengalami peningkatan dalam pembuatan dokumen pelaporan penggunaan dana pada tahun 2024 periode pertama. Hasil evaluasi dari Komite Sekolah yaitu Pengelolaan Dana BOS SMA sudah cukup baik dan transparan, warga sekolah dan masyarakat mengetahui pengelolaan dana yang dilakukan sekolah.

Pelaporan Dana BOS

Sekolah telah membuat laporan sesuai dengan petunjuk teknis BOS SMA. Sekolah melakukan Pelaporan pertanggungjawaban kepada dinas terkait, yaitu Direktorat Pembinaan SMA (pusat), Dinas Pendidikan Menengah dan Khusus

Provinsi Maluku kabupaten Maluku Barat Daya yang berupa laporan ringkas dan dikirim *email*. Laporan ringkas tersebut juga dikirimkan tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi (Sujadi, 2019).

Publikasi Dana BOS

SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya melakukan publikasi terhadap rencana dan penggunaan Dana BOS SMA kepada seluruh warga sekolah. Riyadi (Riyadi, 2021) menyampaikan sekolah memasang rencana yang tertuang dalam RKAS ringkas di papan pengumuman sekolah yang telah disetujui oleh Kepala Sekolah. Publikasi terkait penggunaan Dana BOS SMA, sekolah melakukan publikasi pada saat diadakan rapat pleno antara Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, dan Wali siswa. Sekolah memberikan lembar kertas yang dibagi untuk peserta rapat mengenai komponen penggunaan dana BOS SMA yang dilakukan oleh SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya dan juga melakukan sosialisasi mengenai rencana anggaran untuk periode yang akan datang

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan RKAS SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya tahun 2024 disusun oleh tim anggaran sekolah, untuk merencanakan anggaran kerja sekolah selama satu tahun. Anggaran disusun berdasarkan kumpulan kegiatan/kebutuhan dari guru dan karyawan masing-masing bidang. Rencana sementara yang telah tersusun kemudian dikomunikasikan dengan Komite Sekolah untuk dimintai pertimbangan yang perlu dilaksanakan dalam tahun anggaran tersebut.

Pelaksanaan Dana BOS SMA tahun 2024 diawali penyaluran Dana BOS SMA. Dana BOS SMA tahun 2024 diterima secara dua tahap. Dana BOS SMA diterima pada bulan Januari dan Juli. Pengambilan Dana BOS SMA dilakukan oleh Bendahara BOS dengan menunjukan dokumen yang dibutuhkan kepada bank penyalur. Pembukuan yang dibuat meliputi buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Penyetoran pajak atas Pengelolaan Dana BOS SMA meliputi PPN, PPh pasal 21 dan 22.

Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana BOS SMA tahun 2013 dan 2014 dilaksanakan oleh pihak internal dan eksternal. SMA Negeri 13 Maluku Barat Daya melaporkan Pengelolaan Dana BOS SMA kepada Cabang Dinas Pendidikan Dikmen Diksus Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawan, T. (2020). Dampak Kebijakan BOS terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Menengah Atas. *Pendidikan Dan Kebijakan*, 21 (1),

- 111–122. <https://doi.org/10.5678/jpk.v2i1i.789>
- Hartanto, F. (2017). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Dana BOS*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayati, N. (2019). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Atas. *Administrasi Pendidikan*, 18 (2), 45–57. <https://doi.org/10.3210/jap.v18i2.654>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. R. I. (2024). *Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) Tahun Anggaran 2024*. <https://www.kemdikbud.go.id>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2024). *Bantuan Operasional Sekolah - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah Dan Laporan Tahunan*. <https://bos.kemdikbud.go.id>
- Marzuki, N. (2020). *Praktik Pengelolaan Dana BOS di SMA*. Pustaka Alvabet.
- Mawardi, N. (2019). Pendidikan Dasar dan Tantangan Ekonomi di Indonesia. *Ilmiah Pendidikan*, 23, 123–136.
- Nugroho, D. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana BOS dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas. *Pendidikan Ekonomi*, 15 (4), 204–215. <https://doi.org/10.8765/jpe.v15i4.421>
- Rahman, F. (2021). *Pendidikan dan Kebijakan Pengelolaan Dana BOS*. Salemba Empat.
- Riyadi, H. (2021). *Bantuan Operasional Sekolah: Peluang dan Tantangan*. Balai Pustaka.
- Sari, E. (2016). Dampak Ekonomi terhadap Akses Pendidikan di Era Globalisasi. *Pendidikan Ekonomi Dan Keuangan*, 15, 1.
- Suharto, H. (2017). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Dari Wajib Belajar hingga Bantuan Operasional Sekolah*. Erlangga.
- Sujadi, P. (2019). *Pengelolaan Keuangan Sekolah: Teori dan Praktik*. Gramedia.
- Suryani, A. (2019). *Pengelolaan Dana BOS untuk Meningkatkan Akses Pendidikan di SMA*. PT. Sinergi Edukasi.
- Suryani, A. (2020). Evaluasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Indonesia. *Administrasi Pendidikan*, 15, 77–88.
- Widodo, W. (2015). Pusat Kebijakan dan Manajemen Pendidikan (PKMP), Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Akses Pendidikan di Indonesia. *Dampak Ekonomi Terhadap Pendidikan*.